

Pemerintah Terus Dorong Kualitas Pendidikan Pesantren di Bekasi

CIKARANG (IM) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mendorong peningkatan kualitas pendidikan di lingkungan pondok pesantren (ponpes) melalui regulasi yang tertuang dalam peraturan daerah dengan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan pada lingkup satuan tersebut.

Penjabat Bupati Bekasi, Dani Ramdan di Cikarang, Rabu (25/1) mengatakan sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan, termasuk di lingkungan satuan pendidikan pondok pesantren.

"Kehadiran pondok pesantren sudah sejak dahulu sebagai tempat menuntut ilmu dan basis perjuangan masyarakat Bekasi," katanya.

Dia mengatakan peraturan daerah terkait penyelenggaraan pondok pesantren diperlukan untuk menunjang kemajuan pendidikan mengingat selama ini kewenangan tersebut menjadi urusan pemerintah pusat.

"Ketika kita di daerah mau memfasilitasi tentu membutuhkan payung hukum dan Perda Pondok Pesantren inilah yang akan kita jalankan," katanya.

Ia mengakui selama ini pondok pesantren di wilayahnya yang notabene tidak memiliki sekolah formal belum mendapatkan fasilitas maupun bantuan yang sama seperti sekolah formal pada umumnya.

"Misalnya sekolah dasar, sekolah negeri, swasta bisa mendapatkan BOS (Bantuan Operasional Sekolah), kalau

pesantren yang tidak punya sekolah, tidak bisa," katanya.

Pada, menurut dia, kehadiran pondok pesantren jauh lebih lama dibandingkan sekolah umum yang dikenal masyarakat saat ini meski sama-sama memiliki tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Kita berharap dengan cara seperti ini bukan hanya kementerian saja nanti yang bisa mengakses namun kita juga bisa," katanya.

Pemerintah Kabupaten Bekasi sebenarnya sudah mengalokasikan dana hibah untuk pesantren-pesantren di wilayahnya namun dengan disahkannya peraturan daerah ini, pembiayaan pesantren dapat ditingkatkan sekaligus bisa melalui beberapa perangkat daerah.

"Pertama tentu peningkatan mutu agar pesantren, baik sisi penyelenggaraan atau alumni bisa meningkat. Kedua, tentu sebagai *reward* juga, karena dari pondok pesantren sudah lahir para pejuang, ke depan anak-anak kita yang mengenyam pendidikan di pesantren juga akan mampu memberikan kontribusi besar untuk Kabupaten Bekasi," kata Dani Ramdan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Muhammad Nuh mengatakan tahapan selanjutnya secara detail akan diatur dalam Peraturan Bupati Bekasi. "Namun secara garis besar, mutu dalam pelaksanaan pembelajaran di pesantren akan mampu didorong melalui alokasi anggaran, dengan payung hukum peraturan daerah ini," katanya. ● yan

Dinkes DKI Sisir Imunisasi Campak di Permukiman Padat Penduduk

JAKARTA (IM) - Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta menyisir pelaksanaan imunisasi campak di kawasan prioritas. Di antaranya, permukiman padat penduduk dan kumuh untuk menekan penularan yang kasusnya pada 2022 terdapat mencapai 253 kasus. "Penularan campak sama seperti Covid-19 tapi jauh lebih menular dan sangat cepat," kata Kepala Seksi Surveilans, Epidemiologi dan Imunisasi Dinkes DKI, Ngabila Salama di Jakarta, Rabu (25/1).

Dia menjelaskan, kasus campak di Jakarta pada 2022 mencapai 253 kasus yang banyak ditemukan di daerah yang cakupan imunisasi rendah. Selain itu, juga ditemukan di wilayah padat penduduk, sanitasi dan gizi kurang hingga wilayah perbatasan dengan Depok, Bogor, Tangerang dan Bekasi.

Selain kondisi lingkungan dan sanitasi kurang, Ngabila menambahkan, peningkatan kasus terjadi karena surveilans dan cakupan imunisasi campak rubella menurun menyusul pandemi Covid-19 selama 2020-2022. Padahal, lanjut dia, minimal cakupan imunisasi campak dan rubella (Measles dan Rubella/ MR) mencapai 95 persen.

Adapun MR merupakan vaksin untuk mencegah penularan penyakit akibat virus campak dan rubella. "DKI Jakarta tidak tercapai target pada 2020 hanya 85 persen untuk bayi di bawah dua tahun dan 65 persen bulan imunisasi anak sekolah (BIAS)," ucapnya.

Sedangkan capaian pada 2021 untuk BIAS

mencapai 91 persen dan pada 2022 capaian imunisasi pada bayi berusia di bawah dua tahun mencapai 91 persen. Dinkes DKI meminta para orang tua untuk melengkapi imunisasi MR tiga kali yakni saat berusia sembilan bulan, usia 18 bulan, dan kelas satu sekolah dasar (SD) yang diberikan gratis oleh pemerintah.

"Sebanyak 20-40 persen anak sudah imunisasi MR dua kali, masih bisa menjadi suspek campak. Meski sudah dua kali vaksin MR, namun cakupan rendah di wilayah tersebut dan cakupan vaksinasi tidak merata menyebabkan kenaikan kasus," ucap Ngabila.

Selain balita, campak juga dapat menyerang dewasa usia di atas 18 tahun. Untuk itu, warga berusia 18 tahun ke atas yang terjangkit campak, perlu melakukan imunisasi campak satu bulan setelah sembuh dan direkomendasikan dua kali seumur hidup dengan jeda minimal 28 hari.

Namun, vaksinasi untuk dewasa itu tidak gratis alias berbayar. Saat ini, Dinkes DKI meminta puskesmas kecamatan untuk memetakan daerah yang capaian imunisasi campak masih rendah hingga di level rukun tetangga (RT). Selain itu, menggalakkan edukasi bagi warga khususnya kepada kader dasawisma hingga kader posyandu.

Penularan penyakit campak terbilang cepat karena melalui udara dan droplet dan melalui kontak dengan kulit penderita. Adapun gejalanya yakni demam tinggi, batuk, pilek, mata merah dan ruam merah yang muncul empat hari sesudah awal demam. ● yan

4 | Metropolis

FOTO/ANT



Nasdem-PKS Kritik Menteri PUPR, Sindir Anies Soal Sodetan Ciliwung

Seharusnya pak Basuki bisa lihat kenapa proyek itu belum dijalankan. Saya kecewa terhadap Menteri PUPR Basuki karena malah menjelekkkan upaya Anies tanpa melihat secara utuh masalah normalisasi. Menyoal Pj Gubernur Heru yang menyelesaikan proyek ini dalam waktu beberapa bulan, hal itu bukan semata oleh Heru, kata Politisi Partai NasDem, Bestari Baru.

JAKARTA (IM) - Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengapresiasi upaya Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono dalam melanjutkan upaya pengentasan banjir. Menurutnya, langkah yang dilakukan dengan normalisasi kali, pembangunan sodetan hingga pembangunan

waduk berperan penting mengurangi banjir Jakarta.

Namun demikian, pihaknya menyatakan kekecewaan terhadap pengentasan banjir itu tidak konsisten dilakukan sejak dulu. "Kalau itu konsisten dilakukan dari dulu, pasti sudah berkurang, masalahnya tadi kan enam

tahun ngga diapa-apain, normalisasi ga diapa-apain, sodetan nggak diapa-apain," kata Basuki saat meninjau sodetan Kali Ciliwung-BKT kemarin.

Pernyataan itu ditanggapi beragam oleh berbagai pihak. Politisi Partai NasDem, Bestari Baru menampik, jika enam tahun ke belakang saat Anies menjabat, Jakarta gagal dalam melanjutkan proyek sodetan Ciliwung.

Menurut dia, persoalan mangkrak proyek itu dia sebut karena gugatan warga Bidara Cina terhadap pemerintahan Gubernur Ahok dalam Perubahan SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 81/2014 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Inlet Sodetan Kali Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur (KBT) di PTUN dengan Nomor 59/G/2016/PTUN-JKT dan tak kunjung

selesai.

Ihwal melanjutkan kasasi gugatan, Pemerintahan DKI yang baru, Anies-Sandi, disebut Bestari berperan dalam penyelesaian pembebasan lahan Bidara Cina untuk proyek sodetan.

"Jadi harusnya pak Basuki bisa lihat kenapa proyek itu belum dijalankan. Pak Basuki harusnya lebih menjelaskan," kata Bestari.

Dia mengaku kecewa terhadap Menteri PUPR Basuki karena malah menjelekkkan upaya Anies tanpa melihat secara utuh. Menyoal Pj Gubernur Heru yang menyelesaikan proyek ini dalam waktu beberapa bulan, Bestari menegaskan jika hal itu bukan semata oleh Heru.

"Pak Heru juga bisa menyelesaikan karena rujukan dari RPD DKI yang dibuat oleh gubernur lama, Anies," tutur dia.

Dia mengkritik pernyataan Menteri Basuki, bahwa apa yang dihasilkan saat ini tanpa adanya perencanaan sejak masa Anies. "Ada kejadian apa sebelum itu? ada skemata dan lainnya, kan banyak sekali," jelas dia.

Hal serupa juga dikatakan oleh Ketua Fraksi PKS

RATAS BAHAS KEGIATAN OLAHRAGA NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Menpora Zainudin Amali (kanan) bersama Ketua Komite Olimpiade Indonesia Raja Sapta Oktohari memberikan keterangan pers usai mengikuti rapat terbatas (Ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (25/1). Ratas tersebut membahas pelaksanaan kegiatan olahraga nasional dan internasional seperti FIFA U-20 Word Cup 2023, FIBA Basketball Word Cup 2023 hingga PON 2024.

DPRD DKI Dukong Perluasan 70 Titik Area Tilang ETLE di Jalanan Ibu Kota

JAKARTA (IM) - Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta mendukung rencana penambahan kamera electronic traffic law enforcement (ETLE) atau perluasan 70 titik area tilang elektronik oleh Polda Metro Jaya.

"Melihat dari strategi yang sedang diupayakan untuk pengendalian lalu lintas bahwa ETLE sebagai upaya untuk penegakkan hukum atau law enforcement berbasis IT ini sangat kita dukung," kata Ketua Komisi B Ismail dalam rapat koordinasi di gedung DPRD DKI Jakarta, kemarin.

Ismail mengatakan, sejauh ini pemanfaatan teknologi untuk penegakan hukum memang sudah saatnya dilakukan. Terlebih, Ditlantas Polda Metro Jaya sudah memiliki kajian khusus untuk menempatkan penambahan kamera di 70 titik.

"Terlebih ketika kita melihat empat manfaat yang terkandung di dalamnya," ujarnya. Dalam kesempatan yang

sama, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan ada empat manfaat penggunaan ETLE sebagai metode tilang bagi pengguna jalan yang melanggar.

Pertama, tilang elektronik memudahkan pendataan kepemilikan kendaraan bermotor yang semakin akurat di Jakarta. Kedua, efisiensi pengawasan di lapangan. Ketiga, meminimalisasi paparan polusi terhadap petugas yang akan memperburuk kondisi kesehatan petugas untuk jangka waktu lama. Keempat, dengan diperluasnya area tilang elektronik, masyarakat akan semakin merasa terawasi selama 24 jam sehingga semakin menumbuhkan ketaatan pengguna jalan.

"Dengan cara itu masyarakat juga terdorong untuk beralih menggunakan kendaraan umum," ujar Syafrin.

Sementara itu, Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman mengatakan, jumlah

kendaraan di Jakarta saat ini telah mencapai 22,4 juta dengan panjang ruas jalan mencapai 7.800 kilometer, sehingga terjadi penumpukan kendaraan di jalan. "Penerapan ETLE sangat tepat," kata Latif.

Menurutnya, pelanggaran-pelanggaran yang terekam oleh teknologi ETLE, antara lain menerobos lampu merah; melanggar marka jalan; melawan arus jalan; penggunaan handphone saat berkendara; tidak menggunakan seatbelt; pelanggaran ganjil genap; kendaraan *over speed*; tidak memakai helm; dan lain-lainnya.

Dia menyampaikan bahwa pihaknya bersama Dishub DKI akan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan. "Terima kasih dukungan dari DPRD DKI yang telah mendukung tugas kami dalam pengadaaan ETLE statis sejak 2019. Kami akan membawa wajah Jakarta yang lebih modern," ucapnya. ● yan

Sistem Angkutan Umum Jakarta Siap Dukong Penerapan ERP

JAKARTA (IM) - Dinas Perhubungan DKI Jakarta menilai jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) bisa diterapkan di Jakarta saat ini. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo menilai hal itu didukung oleh sistem angkutan umum di Ibu Kota yang sudah sangat baik.

Cakupan layanan Transjakarta, mulai dari rute nonkoridor, rute koridor, hingga rute mikrotrans totalnya sudah melebihi 90%. Selain itu, sudah ada LRT, MRT, dan KRL. Sebentar lagi pun pemerintah pusat bakal mengoperasikan LRT Jabodebek yang akan menghubungkan warga dari Bodebek ke Jakarta begitu pun sebaliknya.

Kondisi itu, lanjut Syafrin, lebih baik dibandingkan dengan kondisi Singapura saat pertama kali menerapkan ERP pada 1975. Saat itu, kondisi angkutan umum Singapura masih minim. MRT baru mulai dibangun. Namun, Singapura berani mengambil kebijakan demi mengatasi kemacetan untuk jangka panjang. Bisa terlihat hari ini, tidak ada kemacetan berarti di Singapura.

"Dengan kondisi ini artinya sistem angkutan umum sudah siap," tutur Syafrin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (24/1). Meskipun sistem angkutan umum sudah cukup baik, Syafrin menilai tetap harus ada strategi menekan atau *push* guna mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Salah satunya dengan ERP serta kebijakan lain seperti penarikan tarif parkir. "Itu karena harus ada strategi *push*. Jika kita tidak lakukan upaya untuk menekan menggunakan kendaraan pribadi maka akan tetap (macet)," tegasnya.

Ia juga menambahkan, hadirnya ERP bukan berarti Pemprov DKI membatasi kepemilikan kendaraan bermotor karena hal tersebut adalah hak tiap warga negara. "Silakan mempunyai kendaraan sebanyak-banyaknya, tapi saat di jalan kita kendalikan melalui pengendalian lalu lintas," tukasnya. ● yan

PENGUMUMAN

Para pemegang saham PT SIGMA KARYA BUANA, berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan") telah memutuskan untuk meningkatkan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan yang dilakukan dengan cara mengkonversi tagihan (utang) Perseroan kepada pemegang saham, sebagaimana dinyatakan dalam akta tanggal 24 Januari 2023 Nomor 9 dibuat di hadapan TEMMY ANGKAWIJAYA PUTRA, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang. Demikian pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan pasal 6 Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 1999 Tentang Bentuk-bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat dikompensasikan sebagai Setoran Saham.

Jakarta, 26 Januari 2023
Direksi
PT SIGMA KARYA BUANA

PENGUMUMAN

Guna memenuhi ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini PT. INTI MANDIRI INDAH suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Barat (Perseroan), mengumumkan akan terjadi pengambilalihan saham, sehingga akan terjadi perubahan pengendalian saham dalam Perseroan.

Bagi para pihak yang berkeberatan atas perubahan saham pengendalian tersebut dapat mengajukan keberatan dalam waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal pengumuman ini kepada Perseroan dengan alamat Jalan Peternakan II Nomor 15, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 007, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat.

Td.
Direksi
PT. INTI MANDIRI INDAH



AKSI TOLAK EKSPLOITASI LUWAK

Aktivis dari People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) Asia melakukan aksi di depan Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta, Rabu (25/1). Mereka mendesak KLHK untuk menutup operasi peternakan luwak dan menghentikan produksi kopinya karena dinilai telah mengeksploitasi hewan serta meminta Kementerian Agama untuk menghapuskan jaminan produk halal kopi luwak.

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT UTAMA ALAM ENERGI

Dengan ini, Direksi PT Utama Alam Energi, berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan"), mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 10 Februari 2023
Waktu : Pukul 15.15 WIB – selesai
Tempat : Sudirman Plaza - Plaza Marelin Lt. 21 A, Jl. Jend Sudirman Kav. 76-78, Jakarta Selatan
Agenda : Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan ini sampai dengan Rapat diselenggarakan.

Mohon kehadirannya tepat waktu.

Pemanggilan ini guna memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 26 Januari 2023
Direksi Perseroan
PT Utama Alam Energi